

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Hizbullah dalam Konflik Israel-Palestina pada masa kepemimpinan Sayyid Hassan Nasrallah periode 2019-2024 lahir dari tiga dimensi yang saling menopang, yaitu ideologis-identitas, operasional-militer, dan politik-ekonomi domestik. Peran pertama pendekatan konstruktivisme lebih relevan dibanding realisme, karena keterlibatan Hizbullah digerakkan oleh struktur ideasional yang sarat makna intersubjektif, bukan sekadar kalkulasi material. Di bawah Nasrallah, Hizbullah memposisikan dirinya sebagai bagian dari Ummah yang berkewajiban membela kaum tertindas, dengan Palestina sebagai simbolnya. Doktrin Wilayah al-Faqih dan dialektika Karbala, yang membingkai Israel sebagai Yazid masa kini, melahirkan norma intersubjektif yang menjembatani sekat Sunni-Syiah dan menjelaskan kedekatan Hizbullah dengan Hamas serta Jihad Islam Palestina, sekaligus mendasari penolakan tegasnya terhadap Deal of the Century dan Abraham Accords.

Peran kedua memperlihatkan bagaimana fondasi ideologis tersebut diterjemahkan menjadi kapasitas militer nyata. Setelah Jenderal Qasem Soleimani terbunuh pada Januari 2020, Hizbullah berubah dari kekuatan militer domestik menjadi koordinator utama Poros Perlawanan melalui Doktrin Kesatuan Medan Tempur atau Wahdat al-Sahat, yang disetarakan dengan prinsip pertahanan kolektif Pasal 5 NATO dan terwujud melalui Ruang Operasi Bersama di Dahiye, Beirut. Doktrin ini teraktivasi penuh pasca-Operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 melalui pembukaan Front Dukungan. Secara material, Hizbullah mentransfer kapabilitas presisi seperti drone dan rudal Fateh-110 ke Gaza lewat strategi domestic industrial mimicry, berhasil mengikat sepertiga kekuatan reguler Israel di utara, sementara evaluasi Hukum Humaniter Internasional menunjukkan Israel melanggar Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas.

Peran Ketiga menunjukkan bahwa komitmen ideologis dan militer Hizbullah bergantung pada kemampuannya menghadapi tekanan domestik Lebanon. Sistem konfesionalisme sektarian menempatkan Hizbullah dalam dilema antara basis Syiah dan pembelaan Palestina yang mayoritas Sunni, yang diatasi Nasrallah melalui pemingkai Al-Muqawamah sebagai identitas lintas sektarian. Ketika Lebanon

dilanda krisis multidimensi sejak 2019, Hizbullah merespons dengan memisahkan aliran pendanaannya dari sistem negara, ditopang lembaga Al-Qard al-Hasan yang mengedarkan hingga tiga miliar dolar AS per tahun dengan jaminan emas fisik. Ketiga dimensi ini bersama-sama menunjukkan bahwa peran Hizbullah lebih tepat dipahami sebagai kekuatan deterensi strategis yang mengubah keseimbangan kawasan, bukan sebagai aktor yang berhasil mewujudkan pembebasan penuh Palestina.

6.2 Saran Penelitian

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan dinamika Konflik Israel-Palestina, maupun secara akademis bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional di masa mendatang.

a. Saran Praktis

Secara Praktis, bagi para pemangku kebijakan dan aktor diplomasi internasional, termasuk Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, hasil penelitian ini menyarankan perlunya reposisi dan redefinisi pemahaman strategis terhadap konfigurasi aktor non-negara hibrida (*hybrid non-state armed actor*) di Timur Tengah. Negara-negara yang berkomitmen terhadap perdamaian Palestina tidak boleh lagi memandang Hizbullah semata-mata sebagai proksi militer pasif yang digerakkan secara sepihak oleh Teheran. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Hizbullah telah berevolusi menjadi koordinator lapangan utama dalam jaringan regional Poros Perlawanan (*Axis of Resistance*) yang memiliki kemandirian sistem ekonomi paralel (melalui Al-Qard al-Hasan) serta kapabilitas alih teknologi militer asimetris secara mandiri. Oleh karena itu, diplomasi multilateral ke depan harus secara pragmatis memperhitungkan keberadaan Doktrin Kesatuan Medan Tempur (*Wahdat al-Sahat*) yang mengikat front perbatasan Lebanon-Israel dengan intensitas konflik di Gaza. Upaya resolusi konflik atau mediasi gencatan senjata yang komprehensif di Palestina tidak akan pernah mencapai titik kestabilan permanen jika mengabaikan parameter pencegahan militer asimetris (*asymmetric deterrence*) yang dikonsolidasikan oleh Hizbullah di front utara. Selain itu, lembaga kemanusiaan internasional perlu mengantisipasi kerentanan hukum humaniter internasional di wilayah urban padat penduduk Lebanon,

seperti distrik Dahiyyeh, dengan membangun jalur pelindung sipil yang lebih kokoh demi memitigasi dampak destruktif dari penggunaan persenjataan berat..

b. Saran Akademis

Secara akademis, penulis menyarankan agar pengumpulan data primer diperluas dengan melibatkan lebih banyak narasumber ahli dari latar belakang keilmuan dan afiliasi politik yang lebih beragam, tidak terbatas pada satu perspektif tunggal, guna memperkuat triangulasi data serta meminimalisasi potensi bias interpretatif dalam menganalisis fenomena yang sarat dengan kontestasi narasi seperti Konflik Israel-Palestina. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan penggunaan sumber primer berbahasa Arab secara langsung, seperti transkrip pidato asli Sayyid Hassan Nasrallah, untuk memperkaya analisis tekstual yang selama ini banyak bersandar pada literatur sekunder dan hasil terjemahan.

Secara substansial, penelitian ini juga menyarankan agar kajian lanjutan memperluas cakupan analisis secara komparatif terhadap aktor-aktor lain dalam jaringan Poros Perlawanan, seperti kelompok Houthi di Yaman dan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) di Irak, untuk menguji sejauh mana Doktrin Kesatuan Medan Tempur (*Wahdat al-Sahat*) bersifat konsisten dan dapat digeneralisasi di seluruh jaringan aliansi tersebut. Selain itu, mengingat penelitian ini membatasi periode kajian hingga pertengahan tahun 2024, penulis sangat menyarankan agar penelitian selanjutnya melanjutkan analisis pada periode pasca-2024, khususnya mengenai dinamika transisi kepemimpinan Hizbullah setelah gugurnya Sayyid Hassan Nasrallah akibat serangan udara Israel pada September 2024, serta menelaah sejauh mana konstruksi identitas *Al-Muqawamah* dan doktrin operasional yang telah dibangun selama kepemimpinannya tetap dipertahankan, dimodifikasi, atau justru mengalami pergeseran signifikan di bawah kepemimpinan penggantinya. Terakhir, penelitian ini juga membuka ruang bagi penggunaan kerangka teoretis alternatif atau komplementer, seperti teori sekuritisasi (*securitization theory*) atau perspektif pascakolonial, untuk memperkaya pemahaman atas fenomena Hizbullah dan Konflik Israel-Palestina dari sudut pandang yang belum tercakup dalam kerangka konstruktivisme dan politik identitas yang digunakan pada penelitian ini.